

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses dimana individu mendapatkan pengetahuan dan segala sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Setiap individu memiliki kebutuhan akan pendidikan karena pendidikan memberikan kejelasan dan pengetahuan akan kehidupan sehari-hari setiap manusia dalam menjalankan hidupnya. Pendidikan memberikan adanya suatu perubahan yang signifikan atas pola pikir individu, sikapnya maupun perasaannya. Seperti yang dikutip oleh Hikmat dalam bukunya *Manajemen Pendidikan*, “pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan”.<sup>1</sup> Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mencapai kualitas diri yang lebih baik dalam hidupnya.

Berdasarkan uraian pendidikan tersebut, dapat dikatakan betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan suatu bangsa, hal ini tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal III “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

---

<sup>1</sup> Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 15

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Tujuan dalam pendidikan ini akan tercapai jika berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nasional, yaitu prinsip demokratis berlandaskan HAM, prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, prinsip sistematis, terbuka, multi makna dan legalitas, prinsip *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso*, *tut wuri handayani*, dan prinsip pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pendidikan melalui semua prinsip tersebut pemerintah menyelenggarakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 4 yang menjelaskan; “(1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan

---

<sup>2</sup> Prinsip-prinsip Pendidikan. Diakses dari, <http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/listings/prinsip-prinsip-pendidikan-nasional/>, pada tanggal 22 Februari 2014, pukul 07.30 WIB

diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” Melalui prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut, terdapat satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan yang secara umum diselenggarakan oleh pemerintah adalah pendidikan formal. Pendidikan formal salah satunya dilakukan di sekolah. Sekolah

merupakan tempat terselenggaranya suatu pendidikan yang di dalamnya terdapat proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dengan tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak lepas dari adanya peran serta tenaga pendidik yang memberikan pendidikan serta pengetahuan kepada peserta didik sehingga mereka dapat menemukan dan mengetahui serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan, “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Pendidik yang dimaksud dalam lingkup sekolah adalah guru.

Seperti yang tertuang di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Guru berperan dalam memberikan pengetahuan, mentransfer ilmu

kepada peserta didiknya. Proses pendidikan yang dilakukan guru tersebut biasanya dilakukan di sekolah di dalam suatu ruang kelas dengan kegiatan mengajar.

Di dalam proses pendidikan terdapat kegiatan belajar dimana peserta didik atau murid dapat mengetahui sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu dan membuat suatu perubahan dalam pola pikir, sikap dan tindakannya. Peserta didik belajar dengan diarahkan, dibimbing, diberi pengetahuan, diberi motivasi oleh tenaga pendidik atau guru dalam proses mengajar yang terjadi di dalam kelas. Guru sebagai tenaga profesional memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik dalam upaya tercapainya tujuan pendidikan. Dalam hal ini guru melakukan pekerjaannya dalam rangka mengabdikan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk memberikan suatu apresiasi terhadap suatu pengabdian yang dilakukan oleh guru, guru mendapatkan penghasilan serta penghargaan yang sesuai agar tercapai kepuasan kerja sehingga guru dapat meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerjanya. Kepuasan kerja guru dalam hal ini perasaan karena sesuatu yang dikerjakannya dan dilakukannya memberikan pengetahuan kepada peserta didik mendapat apresiasi atau timbal balik yang sesuai. Sinambela menjelaskan di dalam bukunya, Kinerja Pegawai, "kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya

yang dihasilkan oleh usahanya sendiri (internal) dan yang didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya (eksternal), atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu sendiri.”<sup>3</sup> Guru akan mencapai kepuasan kerjanya apabila hasil kerja yang diterimanya sesuai sehingga dapat membangkitkan semangat guru dalam mengajar peserta didiknya.

Namun, hal ini akan berbeda kepuasan kerja guru tidak akan tercapai apabila terdapat kendala dalam memberikan apresiasi penghargaan kepada guru melalui penghasilan yang diterimanya. Seperti dalam kutipan berita JPNN.com

Para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) mengeluhkan belum cairnya TPP tahap I yaitu triwulan pertama Januari-Maret.

Hingga kini, para guru yang jumlahnya mencapai hampir ribuan orang itu belum tahu dan tidak memperoleh kepastian waktu pembayarannya.

Salah seorang guru SD, Sahroni yang enggan menyebut asal sekolahnya mengungkapkan, untuk triwulan pertama ini seharusnya TPP dicairkan pada bulan April. Namun hingga memasuki bulan Juni ini, belum ada kejelasan kapan TPP akan dicairkan.<sup>4</sup>

Di dalam berita tersebut, tunjangan profesi pendidik di wilayah dinas pendidikan kabupaten bekasi terlambat cair yang kemungkinan disebabkan suatu oknum-oknum. Hal ini dapat menyebabkan

---

<sup>3</sup> Lijan Poltak Sinambela. *Kinerja Pegawai*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 256

<sup>4</sup> Guru Mengeluh TPP Januari-Maret Belum Cair Hingga Juni, diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/239007/Guru-Mengeluh-TPP-Januari-Maret-Belum-Cair-hingga-Juni>, pada tanggal 21 Februari 2015 pukul 20.34 WIB.

berkurangnya kepuasan kerja guru yang mengabdikan kepada negara karena tunjangan yang diterimanya juga diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini juga sama diungkapkan oleh berita *online* lain.

**Bekasi, BeritaTv.net** – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, dituding sudah mengendapkan uang Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Bekasi. Pasalnya, sampai saat ini tunjangan yang seharusnya dikeluarkan disetiap bulan tersebut belum dikeluarkan oleh pihak Disdik. "kami menduga uang TPP itu diendapkan oleh oknum Disdik,"cetus ketua Persidium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Intelektual Peduli Rakyat (SNIPER) Gunawan, kepada BeritaTv.net, Kamis (5/6). "Sampai hari ini Kamis, 5 Juni 2014 para guru PNS SD Se-Kabupaten Bekasi belum menerima uang tunjangan profesi," jelasnya.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam hal ini tingkat daerah harus memberikan penjelasan dan konfirmasi sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah setempat dengan guru memungkinkan adanya kesalahpahaman dalam masalah telatnya tunjangan profesi pendidik ini. Selain itu, seluruh guru PNS juga saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk memberikan masukan atau informasi kepada dinas pendidikan daerah setempat mengenai keterlambatan turunnya tunjangan tersebut sehingga

---

<sup>5</sup> Tunjangan TPP Guru Belum Cair, diakses dari <http://www.beritatv.net/?p=1075>, pada tanggal 21 Februari 2015 pukul 20.40 WIB.

mereka dapat bertindak dengan cepat dan memberikan alasan atau penyebabnya secara langsung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Berdasarkan penjelasan Robbins dalam bukunya *Organizational Behavior* yang telah diterjemahkan oleh Diana Angelica dkk, setiap pekerjaan menuntut mereka dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang acap kali kurang ideal dan lain-lain.<sup>6</sup> Dalam hal ini guru atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya akan selalu berhubungan dengan elemen-elemen pekerjaan tersebut dan menilai ketidakpuasan atau kepuasan guru atas hal tersebut, salah satunya seperti isu di atas adanya ketidakpuasan guru yang berakibat dari kebijaksanaan atau kondisi-kondisi kerja yang mengalami kendala.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu mengkaji tentang Hubungan Antara Koordinasi dengan Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

---

<sup>6</sup>Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Penerjemah: Diana Angelica, dkk. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) : terjemahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 107-108



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja guru?
2. Seperti apa kepuasan kerja guru di SD Negeri Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimanakah koordinasi yang terjadi dalam setiap pekerjaan di SD Negeri Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
4. Apakah koordinasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja guru?
5. Sejauh mana koordinasi mempengaruhi kepuasan kerja guru SD Negeri Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
6. Adakah terdapat hubungan antara koordinasi dengan kepuasan kerja guru?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu koordinasi sebagai variabel (X) yang merupakan variabel bebas yang dibatasi dalam hal kerja sama, pembagian tugas, komitmen tinggi, mengutamakan kepentingan bersama, menguntungkan organisasi, komunikasi, tepat waktu dan kepuasan kerja sebagai variabel (Y) yang

merupakan variabel terikat yang dibatasi dalam hal perasaan atas pekerjaan, perasaan terhadap perolehan gaji, perasaan terhadap penghargaan, perasaan terhadap pengawasan, perasaan terhadap hubungan dengan rekan kerja. Sasaran penelitian ini adalah guru PNS di SDN Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Penelitian dilakukan pada bulan Januari - Mei tahun 2015.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan positif antara koordinasi dengan kepuasan kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?”

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Sebagai acuan dan bahan untuk lebih memahami konsep koordinasi dengan kepuasan kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi bagi pengembangan keilmuan Jurusan Manajemen Pendidikan

## 2. Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sebagai pengetahuan dan masukan dalam menjalankan koordinasi kerja yang baik dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja bagi para guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
- b. Bagi guru, sebagai masukan agar dapat mendukung terciptanya koordinasi kerja yang baik sehingga guru dapat memiliki kepuasan kerja yang sesuai dan membuat semangat dalam bekerja dalam mengembangkan kemampuan dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.
- c. Bagi peneliti, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama kuliah dan dapat menambah wawasan tentang kepuasan kerja guru.